p-ISSN:2598-1218
e-ISSN:2598-1226

Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah (Implementasi Kegiatan IHT Penyusunan Kurikulum dan Sistem Penilaian di SMK Putra Gununghalu Kabupatem Bandung Barat)

Sadiyah *[1], Agus Mulyanto [2], Deasy Nurmaulidah [3], Nurlaeni [4], Asep Setiawan [5]

[1) 2) 3) 4) 5)] Program Doktoral Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara
e-mail: deasy.nm22@gmail.com

Abstract

The Community Partnership Program (PKM) aims to enhance the capacity of teachers in developing the School-Based Curriculum (KSP) and assessment systems at SMK Putra Gununghalu, West Bandung Regency. The implementation method is divided into four main phases: administration, planning, implementation, and evaluation. The administration phase involves preparing supporting documents and initial coordination with partners. The planning phase includes identifying partner needs, preparing proposals, and budgeting. The implementation phase is systematically designed through intensive training in the form of In-House Training (IHT), which covers socialization of the KSP, development of teaching materials, and competency-based assessment systems. This activity is conducted using interactive methods such as lectures, group discussions, and hands-on practice. The program evaluation is carried out comprehensively, both in terms of process and outcomes, to assess the effectiveness of the training and its impact on teaching practices at the partner school. The evaluation results serve as a basis for future program improvements and the strengthening of sustainable collaboration between the PKM team and the partner school.

Keywords: Community Partnership Program, School-Based Curriculum, assessment system, program evaluation, teacher training, IHT.

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dan sistem penilaian di SMK Putra Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat. Metode pelaksanaan program terbagi dalam empat tahap utama, yaitu tahap administrasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap administrasi dilakukan penyusunan dokumen pendukung dan koordinasi awal dengan mitra. Tahap perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan proposal, dan penyiapan anggaran. Tahap implementasi dirancang secara sistematis melalui pelatihan intensif berupa In House Training (IHT) yang mencakup sosialisasi KSP, penyusunan perangkat ajar, serta sistem penilaian berbasis kompetensi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode interaktif seperti ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Evaluasi program dilakukan secara menyeluruh, baik secara proses maupun hasil, untuk menilai efektivitas pelatihan serta dampaknya terhadap perubahan praktik pembelajaran di sekolah mitra. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program ke depan dan penguatan kerjasama berkelanjutan antara tim PKM dan mitra sekolah.

Kata Kunci: Program Kemitraan Masyarakat, Kurikulum Satuan Pendidikan, sistem penilaian, evaluasi program, pelatihan guru, IHT.

PENDAHULUAN

Pendidikan menengah kejuruan memiliki peranan strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai di dunia kerja. Dalam konteks tersebut, SMK dituntut mampu menyelenggarakan pembelajaran yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan industri. Kurikulum yang diterapkan harus responsif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi. Dalam Kurikulum Merdeka, penyusunan dan pengelolaan kurikulum tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan menempatkan satuan pendidikan sebagai aktor utama dalam merancang pembelajaran yang kontekstual. Hal ini memerlukan kapasitas manajerial yang kuat dari setiap sekolah, terutama dalam hal perencanaan dan pengembangan kurikulum serta sistem penilaian. Penguatan kapasitas tersebut idealnya dilakukan melalui kegiatan pelatihan internal, seperti In-House Training (IHT). Sayangnya, tidak semua sekolah memiliki kesiapan dalam mengelola IHT secara optimal. Kendala umum yang sering dijumpai antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang substansi kurikulum merdeka, lemahnya kolaborasi antar guru, serta keterbatasan dalam menerapkan penilaian berbasis kompetensi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang sistematis dan berkelanjutan dalam penguatan manajemen kurikulum di SMK.

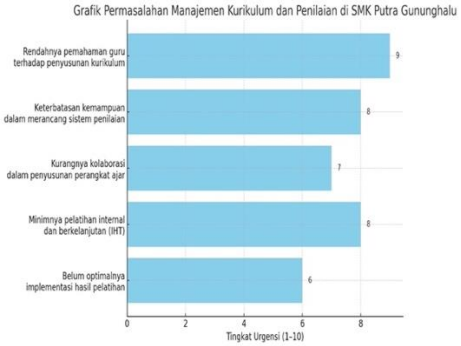

Gambar 1. Grafik Permasalahan Utama Dalam Manajemen Kurikulum

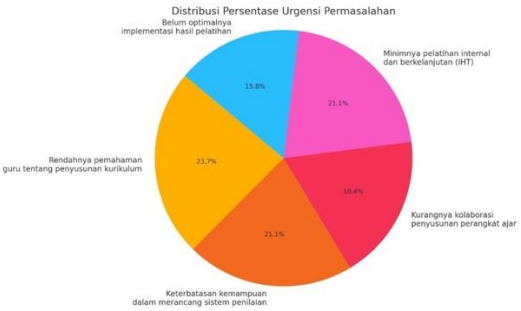

Gambar 2. Grafik Distribusi Urgensi Permasalahan dalam Manajemen Kurikulum

Data awal dari hasil survei internal di salah satu SMK menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada rendahnya tingkat pemahaman guru terhadap prinsip dasar Kurikulum Merdeka. Dari total responden, sekitar 38% guru menyatakan belum sepenuhnya memahami kerangka kurikulum dan strategi penyusunan capaian pembelajaran. Sebanyak 26% menyebutkan masih kesulitan dalam menyusun sistem penilaian autentik yang mencerminkan ketercapaian kompetensi siswa. Sementara 18% menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan selama ini bersifat monoton dan belum menyentuh kebutuhan riil mereka. Sisanya, 12% menyoroti lemahnya kerja tim dalam penyusunan perangkat ajar, dan 6% menganggap hasil pelatihan belum diimplementasikan secara nyata. Data ini divisualisasikan dalam bentuk grafik *pie chart* yang menggambarkan distribusi masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan IHT. Visualisasi ini memperkuat argumen bahwa tantangan implementasi kurikulum merdeka tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek manajerial dan budaya organisasi sekolah. Tanpa adanya perencanaan yang matang dan pelibatan seluruh komponen sekolah, maka penguatan kurikulum melalui IHT hanya menjadi rutinitas administratif semata.

Dalam konteks pengelolaan kurikulum di SMK, kegiatan IHT dapat dijadikan sebagai ruang strategis untuk

membangun pemahaman kolektif serta menyelaraskan visi pembelajaran antar pendidik. Melalui IHT, guru dapat diberdayakan untuk memahami substansi kurikulum secara menyeluruh, mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan materi ajar, hingga teknik penilaian berbasis kompetensi. IHT juga berperan dalam membangun ekosistem kolaboratif antar guru lintas mata pelajaran untuk merancang perangkat ajar yang integratif dan aplikatif. Dengan demikian, IHT menjadi instrumen penting dalam mewujudkan manajemen kurikulum yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Namun, efektivitas IHT sangat ditentukan oleh desain pelaksanaan yang dirancang secara terstruktur. Dalam hal ini, penerapan prinsip manajemen modern seperti pendekatan POAC *(Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling)* menjadi sangat relevan. Dengan kerangka POAC, seluruh proses pelaksanaan IHT dapat dikontrol dan dievaluasi secara sistematis, sehingga hasilnya dapat berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan secara tepat sasaran.

Sekolah yang menjadi mitra dalam kegiatan ini berada di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi menengah ke bawah. Lokasi sekolah cukup jauh dari pusat kota, dengan akses informasi dan teknologi yang masih terbatas. Meskipun demikian, wilayah ini menyimpan potensi lokal yang besar di bidang pertanian dan kewirausahaan mikro. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan guru yang berfokus pada pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal. Selain itu, belum adanya sinergi antara pihak sekolah dengan pemangku kepentingan lokal seperti UMKM dan komunitas pertanian juga menjadi hambatan tersendiri. Padahal, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran kontekstual sesuai karakteristik daerah. Oleh karena itu, penguatan manajemen kurikulum melalui kegiatan IHT diharapkan dapat menjadi jalan masuk untuk mengintegrasikan potensi lokal ke dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat sekitar.

Perumusan masalah dalam kegiatan ini mencakup lima aspek utama yang menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana proses perencanaan IHT dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan guru? Kedua, bagaimana struktur pengorganisasian sumber daya dilakukan, termasuk peran kepala sekolah, koordinator kurikulum, dan guru? Ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan IHT dijalankan dalam praktik, mulai dari penyusunan materi hingga evaluasi hasil belajar? Keempat, bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan IHT dilakukan untuk mengukur efektivitasnya? Kelima, bagaimana tindak lanjut hasil kegiatan IHT dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kurikulum? Rumusan ini disusun agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pengelolaan kurikulum. Dengan demikian, seluruh proses kegiatan dapat dipantau, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkesinambungan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas manajemen kurikulum dan sistem penilaian melalui pendekatan pelatihan internal berbasis POAC. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran khusus yang meliputi peningkatan pemahaman guru terhadap prinsip dasar Kurikulum Merdeka, penguatan kolaborasi dalam penyusunan perangkat ajar, dan pengembangan sistem penilaian autentik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan budaya evaluasi dan refleksi dalam pelaksanaan

IHT. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan kurikulum. Sasaran kegiatan juga mencakup integrasi potensi lokal ke dalam kurikulum sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan daerah. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi oleh sekolah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak internal tetapi juga berkontribusi pada pengembangan mutu pendidikan kejuruan secara lebih luas.

Kegiatan In House Training (IHT) dalam pengelolaan kurikulum dan sistem penilaian di SMK Putra Gununghalu mencerminkan strategi internal yang penting dalam konteks peningkatan mutu pendidikan menengah kejuruan. IHT dilaksanakan sebagai jawaban atas kebutuhan akan forum pelatihan yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pembekalan teknis, tetapi juga membentuk budaya kolaborasi dan refleksi di kalangan guru. Seluruh tahapan IHT dilaksanakan berdasarkan pendekatan manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dan ditambahkan aspek tindak lanjut sebagai bentuk penguatan. Pada tahap perencanaan, sekolah memetakan kebutuhan pelatihan, menetapkan indikator keberhasilan, dan mengorganisasikan sumber daya yang tersedia. Pengorganisasian dilakukan secara sistematis dengan melibatkan tim pengembang kurikulum, kepala sekolah, dan para guru dari lintas program keahlian. Tahap pelaksanaan diisi dengan sesi diskusi, workshop penyusunan dokumen kurikulum, serta simulasi sistem penilaian berbasis kompetensi. Evaluasi dilakukan melalui analisis ketercapaian hasil belajar dan kualitas dokumen yang dihasilkan selama pelatihan. Tahapan tindak lanjut menekankan pada implementasi hasil IHT dalam praktik pembelajaran dan perbaikan kurikulum secara berkelanjutan.

Guna memperkuat analisis terhadap pelaksanaan IHT, digunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk memetakan kekuatan dan tantangan yang dihadapi sekolah. Kekuatan utama terletak pada komitmen pimpinan sekolah dan semangat kolaboratif sebagian besar guru dalam menyukseskan program ini. Selain itu, keberadaan narasumber internal yang kompeten memberikan nilai tambah terhadap efektivitas pelatihan. Namun demikian, sejumlah kelemahan masih menjadi hambatan, di antaranya rendahnya pemahaman sebagian guru terhadap Kurikulum Merdeka dan sistem penilaian autentik. Waktu pelaksanaan yang terbatas serta beban administratif guru juga menjadi faktor penghambat. Peluang muncul dari dukungan kebijakan nasional, potensi kerja sama dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri), serta akses terhadap platform digital pembelajaran. Ancaman eksternal seperti perubahan kebijakan yang cepat, keterbatasan anggaran, dan rendahnya literasi digital turut menjadi tantangan dalam keberlangsungan IHT. Hasil analisis SWOT ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kegiatan pelatihan agar lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan memahami konteks ini secara menyeluruh, sekolah dapat menetapkan arah kebijakan penguatan kapasitas pendidik secara lebih efektif.

Sebagai pelengkap data kualitatif, kegiatan ini juga dilengkapi dengan analisis grafik yang menggambarkan urgensi masalah dalam implementasi manajemen kurikulum dan sistem penilaian di sekolah. Grafik batang menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap kurikulum merupakan permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani, dengan persentase mencapai lebih dari 40%. Diikuti oleh keterbatasan dalam perancangan sistem penilaian dan kurangnya pelatihan internal yang

berkelanjutan. Grafik pie chart kemudian memvisualisasikan distribusi persentase tiap permasalahan berdasarkan tingkat urgensinya secara lebih rinci. Data tersebut diperoleh melalui survei internal yang melibatkan guru dari berbagai jurusan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik sederhana. Visualisasi ini menjadi alat bantu untuk menyusun strategi prioritas pelatihan dan intervensi manajerial. Grafik juga membantu dalam mengevaluasi dampak kegiatan IHT terhadap perubahan persepsi dan pemahaman guru. Dengan penyajian data visual ini, pengambilan keputusan oleh manajemen sekolah menjadi lebih objektif dan berbasis bukti. Ini sejalan dengan pendekatan evidence-based dalam pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas (Mulyasa, 2021).

Berdasarkan hasil survei dan diskusi kelompok terfokus (FGD), ditemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan IHT adalah keberagaman tingkat kompetensi guru dalam menyusun perangkat ajar. Beberapa guru masih kesulitan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam mengakomodasi gaya belajar siswa yang beragam. Kelemahan ini mengindikasikan perlunya pendampingan intensif pasca pelatihan agar proses transfer pengetahuan tidak terhenti pada tataran teoritis. Evaluasi formatif juga menunjukkan bahwa implementasi hasil IHT belum optimal di seluruh program keahlian. Sebagian guru belum mampu menyusun asesmen berbasis proyek secara sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran. Selain itu, kurangnya supervisi internal menyebabkan tidak adanya kontrol kualitas terhadap dokumen hasil IHT. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelatihan semata tidak cukup tanpa strategi tindak lanjut yang konkret dan terstruktur. Oleh karena itu, model manajemen berbasis komunitas belajar guru (PLC) diusulkan sebagai solusi jangka panjang. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengembangkan budaya belajar profesional yang berkelanjutan (DuFour et al., 2016).

Secara keseluruhan, kegiatan IHT dalam penguatan manajemen kurikulum dan sistem penilaian di SMK Putra Gununghalu menjadi langkah awal yang penting untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk hilirisasi dari hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan pendidikan nasional. Dengan menyelaraskan antara potensi lokal, kebutuhan peserta didik, dan standar kompetensi global, sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang adaptif dan kompetitif. Kurikulum tidak lagi dipahami sebagai dokumen statis, melainkan sebagai alat transformasi pendidikan yang harus terus dikembangkan secara kontekstual. Melalui pendekatan manajerial yang sistematis, berbasis data, serta melibatkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, manajemen kurikulum dapat ditingkatkan secara signifikan. Kegiatan IHT terbukti menjadi wahana strategis untuk membangun kapasitas guru secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan hingga refleksi hasil belajar. Diperlukan keberlanjutan program, monitoring berkala, dan peningkatan kualitas pelatihan berbasis kebutuhan riil lapangan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan vokasional di tingkat sekolah menengah. Selain itu, hasilnya dapat dijadikan model replikasi bagi sekolah lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE

A. Tahap Administratif

Proses administratif dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di SMK Putra Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari beberapa tahapan sistematis yang memastikan kelancaran kegiatan. Rincian kegiatan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Administratif dalam Pelaksanaan IHT

No	Tahapan	Rincian Kegiatan Administratif
1	Perencanaan	1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah mitra 2. Menyusun proposal kegiatan 3. Menyiapkan RAB 4. Melengkapi dokumen pendukung (SK tim, surat tugas, dan surat kesediaan mitra)
2	Persiapan	1. Melakukan koordinasi teknis dengan sekolah 2. Menyusun jadwal dan undangan IHT 3. Mempersiapkan materi kurikulum & sistem penilaian 4. Menyediakan daftar hadir, berita acara, dokumentasi, serta logistik lainnya
3	Pelaksanaan	1. Registrasi peserta 2. Pembukaan kegiatan secara resmi 3. Pelatihan KSP dan sistem penilaian oleh narasumber 4. Diskusi dan praktik penyusunan kurikulum 5. Pengisian daftar hadir dan evaluasi
4	Dokumentasi & Laporan	1. Penyusunan laporan naratif kegiatan 2. Pembuatan laporan keuangan dan lampiran 3. Menyusun output berupa modul, artikel PKM, dan draft kurikulum 4. Penyerahan laporan kepada institusi dan mitra
5	Tindak Lanjut	1. Melakukan monitoring dan evaluasi 2. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kurikulum

Berdasarkan tahapan di atas, seluruh proses kegiatan administratif dirancang untuk menjamin ketercapaian target PKM secara efektif dan efisien, dengan fokus pada partisipasi aktif mitra dan keberlanjutan hasil.

B. Tahap Perencanaan Program

Langkah awal pelaksanaan PKM adalah melakukan analisis kebutuhan mitra. Proses ini menjadi landasan untuk merumuskan strategi kegiatan yang tepat guna dan relevan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan Mitra: Melakukan observasi dan komunikasi langsung guna memahami tantangan dan kebutuhan pendidikan di sekolah mitra.
2. Penyusunan Proposal PKM: Membuat dokumen formal yang merinci latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, dan indikator keberhasilan kegiatan.
3. Perencanaan Anggaran (RAB): Menyusun estimasi biaya secara rinci mencakup konsumsi, materi pelatihan, dan keperluan lainnya.
4. Dokumentasi Pendukung: Melengkapi persyaratan administratif seperti SK tim, surat tugas, dan surat kesediaan dari pihak sekolah mitra.

Pada tahap persiapan teknis, dilakukan kegiatan berikut:

1. Koordinasi teknis dengan pihak sekolah
2. Pembuatan surat undangan dan jadwal kegiatan
3. Penyusunan materi pelatihan terkait kurikulum dan penilaian
4. Menyiapkan logistik dan dokumen pelengkap kegiatan (daftar hadir, notula, berita acara)

C. Tahap Implementasi Program

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan dalam satu hari penuh dengan jadwal terstruktur dan sistematis. Berikut adalah rincian agenda kegiatan:

Tabel 2. Susunan Acara Pengabdian Kepada Masyarakat

Waktu	Kegiatan
08.00 – 08.30	Registrasi peserta dan pembukaan resmi oleh tim pelaksana dan pihak sekolah
08.30 – 09.30	Sesi I: Sosialisasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP)
09.30 – 10.30	Sesi II: Penyusunan Komponen KSP dan Integrasi Profil Pelajar Pancasila
10.30 – 10.45	Istirahat
10.45 – 11.45	Sesi III: Pelatihan sistem penilaian berbasis kompetensi
11.45 – 12.30	Sesi IV: Diskusi kelompok dan praktik

	penyusunan perangkat ajar
12.30 – 13.00	Ishoma (Istirahat, Shalat, Makan Siang)
13.00 – 14.00	Sesi V: Refleksi, evaluasi, dan penutupan

Aktivitas Utama dalam Implementasi:

1. Registrasi Peserta mengisi daftar hadir untuk dokumentasi.
2. Pelatihan Inti (IHT), materi disampaikan secara interaktif mencakup penyusunan KSP dan sistem penilaian.
3. Diskusi dan Praktik, peserta berkelompok untuk menyusun perangkat ajar.
4. Pendampingan, narasumber memberikan bimbingan teknis langsung.
5. Evaluasi: Peserta mengisi form evaluasi kegiatan sebagai feedback.
6. Dokumentasi, kegiatan didokumentasikan melalui foto, notula, dan berita acara. Sertifikat diberikan pada akhir kegiatan.

Pelaksanaan ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif guna mendorong pemahaman sekaligus keterampilan praktis peserta dalam menyusun kurikulum dan penilaian.

D. Tahap Evaluasi Program

Evaluasi menjadi tahapan kunci untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan memberikan umpan balik strategis bagi pengembangan program. Evaluasi dilakukan dalam tiga bentuk utama:

1. Evaluasi Proses: Menilai pelaksanaan teknis saat kegiatan berlangsung melalui:
   a. Daftar hadir
   b. Observasi langsung
   c. Notula kegiatan dan catatan lapangan
2. Evaluasi Hasil *(Output):* Mengukur hasil langsung dari pelatihan melalui:
   a. Peningkatan pemahaman peserta *(pre-post test)*
   b. Kualitas produk ajar yang disusun
   c. Partisipasi aktif selama sesi pelatihan
3. Evaluasi Dampak *(Outcome):* Menilai penerapan hasil pelatihan dalam jangka menengah, seperti:
   a. Implementasi hasil pelatihan di sekolah
   b. Perubahan perilaku dan kompetensi guru
   c. Kepuasan pihak mitra terhadap hasil program
4. Penyusunan Laporan Evaluasi: Hasil evaluasi disusun dalam laporan lengkap yang mencakup:
   a. Ringkasan kegiatan
   b. Analisis hasil dan kendala
   c. Rekomendasi perbaikan
   d. *Draft* artikel ilmiah dan dokumen luaran lainnya

Tabel 3. Instrumen Kuesioner Evaluasi Program

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
A. Pelaksanaan Kegiatan						
1	Waktu pelaksanaan sesuai jadwal					
2	Tempat kegiatan nyaman dan kondusif					
3	Fasilitas dan logistik mendukung kegiatan					
B. Materi dan Penyampaian						
4	Materi sesuai kebutuhan guru					
5	Penyampaian materi sistematis dan mudah dipahami					
6	Waktu penyampaian cukup					
C. Fasilitator/Narasumber						
7	Fasilitator menguasai materi					
8	Fasilitator menjawab pertanyaan dengan jelas					
9	Interaksi antara peserta dan fasilitator terjalin baik					

Bagian metode ini harus dapat menjelaskan metode pengabdian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya. Alat, bahan, media atau instrumen pengabdian harus dijelaskan dengan baik. Jika perlu dan penting, ada lampiran mengenai kisi-kisi dari instrumen atau penggalan bahan yang digunakan sekedar memberikan contoh bagi para pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil yang Dicapai Berdasarkan Luaran Program

1) Penyusunan Dokumen Kajian Implementasi Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian

Melalui pelaksanaan kegiatan *In-House Training* (IHT), telah dihasilkan sebuah dokumen kajian komprehensif mengenai penerapan manajemen kurikulum dan sistem penilaian berbasis Kurikulum Merdeka di SMK Putra Gununghalu. Dokumen ini berisi analisis mendalam terhadap kebutuhan sekolah, identifikasi kendala, strategi implementasi, serta praktik baik yang telah diterapkan oleh tim guru dan manajemen sekolah. Selain itu, dokumen ini mencakup penyusunan perangkat kurikulum dan instrumen penilaian formatif maupun sumatif yang relevan. Keberadaan dokumen ini menjadi landasan penting bagi pengambilan kebijakan internal sekolah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Gambar 1. Penyampaian Materi dari Ketua Tim PKM

Gambar 2. Penyampaian Materi dari TIM PKM

Gambar 3. Penyampaian Materi dari Narasumber 1

Gambar 4. Penyampaian Materi dari Narasumber 2

2) Pengembangan Rekomendasi Strategis untuk Sekolah

Gambar 5. Apresiasi Peserta PKM Teraktif

Sebagai hasil dari kajian mendalam dan diskusi intensif selama kegiatan pelatihan, telah dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pimpinan sekolah. Rekomendasi ini mencakup penguatan peran aktif Tim Pengembang Kurikulum dalam menyusun dan merevisi dokumen perencanaan pembelajaran sesuai dengan konteks sekolah (Suharyanto, 2022), penerapan asesmen berbasis proyek untuk mendorong pembelajaran bermakna dan berorientasi pada kompetensi peserta didik (Nugroho & Lestari, 2021), efisiensi dalam

administrasi pembelajaran melalui digitalisasi dokumen dan pelaporan (Wijayanti et al., 2023), serta peningkatan literasi guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai media pendukung pengembangan profesionalisme guru (Kemendikbudristek, 2022). Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola kurikulum secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3) Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi Profesional Guru

Gambar 6. Peserta PKM SMK Putra Gunung Halu

Kegiatan pelatihan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas profesional guru. Fokus utama terletak pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Peserta pelatihan menjadi lebih terampil dalam menyusun capaian pembelajaran (CP), tujuan pembelajaran (TP), dan alur tujuan pembelajaran (ATP). Guru juga mampu merancang instrumen penilaian autentik yang kontekstual (Mulyasa, 2021). Penerapan pembelajaran berdiferensiasi semakin tepat, menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan semangat Kurikulum Merdeka (Sari & Pranoto, 2022; Kemendikbudristek, 2022). Kompetensi guru meningkat secara nyata dalam merancang pengalaman belajar yang inklusif dan berpihak pada peserta didik.

4) Penyusunan Model Praktik Baik yang Dapat Direplikasi oleh Sekolah Lain

Gambar 7. Proses Kegiatan PKM

Dokumen hasil pelatihan tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan internal. Materi dikembangkan sebagai model praktik baik yang dapat direplikasi oleh sekolah lain, khususnya yang sedang menyesuaikan diri dengan Kurikulum Merdeka. Model ini mencakup alur pelatihan, strategi pelaksanaan IHT, dan dokumentasi pembelajaran yang terbukti efektif di konteks pendidikan menengah kejuruan (Susanto, 2022). Model tersebut memberikan referensi konkret bagi satuan pendidikan lain dalam mengimplementasikan program serupa secara mandiri dan sistematis.

5) Diseminasi Hasil Melalui Publikasi Ilmiah

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk disebarluaskan melalui publikasi ilmiah. Target publikasi diarahkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 atau jurnal internasional bereputasi di bidang pendidikan (Putra & Wulandari, 2023). Diseminasi ilmiah ini bertujuan memperluas jangkauan dampak kegiatan, menjangkau akademisi, praktisi, serta pengambil kebijakan. Dengan demikian, praktik baik yang dihasilkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan mutu pendidikan secara luas (Kemendikbudristek, 2022).

B. Hasil Berdasarkan Analisis Kerangka Tujuan dan Potensi Keberlanjutan

Sebagian besar peserta pelatihan mengungkapkan bahwa motivasi utama mengikuti kegiatan ini berasal dari kebutuhan mendesak untuk memahami implementasi Kurikulum Merdeka, yang

kini menjadi kebijakan nasional dalam sistem pendidikan. Kurikulum ini menuntut guru memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen pembelajaran yang berpusat pada murid, serta pendekatan asesmen yang lebih kontekstual (Kemendikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, pelatihan dipandang sebagai momen strategis untuk meningkatkan kapasitas profesional pendidik, terutama dalam menyusun dokumen pembelajaran seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan perencanaan asesmen formatif maupun sumatif (Suharyanto, 2022).

Materi pelatihan mencakup berbagai komponen esensial dari Kurikulum Merdeka. Topik-topik seperti penyusunan capaian pembelajaran (CP), tujuan pembelajaran (TP), ATP, hingga penyusunan modul ajar dan asesmen autentik disajikan secara komprehensif. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi guru dalam menyusun pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik siswa (Nugroho & Lestari, 2021). Peserta menyampaikan bahwa materi sangat relevan dan aplikatif. Namun, muncul saran untuk menambah durasi pelatihan agar seluruh topik dapat dibahas lebih mendalam dan aplikatif di kelas.

Fasilitator pelatihan memperoleh penilaian positif dari peserta. Mereka dinilai mampu menyampaikan materi dengan cara yang komunikatif, sistematis, dan mudah dipahami. Diskusi berjalan interaktif, dan berbagai persoalan praktis di lapangan ditanggapi secara aktif oleh fasilitator. Metode partisipatif seperti ini terbukti mempercepat pemahaman peserta terhadap konsep yang disampaikan (Mulyasa, 2021). Dari segi teknis, pelatihan berjalan lancar. Fasilitas memadai, waktu pelaksanaan tepat, dan suasana mendukung proses pembelajaran. Beberapa peserta menyarankan pelaksanaan pelatihan ke depan dilakukan pada masa libur semester agar tidak berbenturan dengan kewajiban mengajar.

Dampak langsung pelatihan tampak pada peningkatan rasa percaya diri peserta dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum. Mereka merasa lebih siap merancang modul ajar, menyusun instrumen asesmen autentik, serta menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi (Sari & Pranoto, 2022). Sebagian besar peserta bahkan melaporkan peningkatan keterampilan menyusun modul ajar kontekstual dan merancang asesmen formatif berbasis situasi nyata. Untuk pelatihan berikutnya, peserta mengusulkan adanya sesi praktik intensif seperti simulasi penyusunan perangkat ajar agar hasil pelatihan lebih aplikatif.

Metode pelatihan berbasis studi kasus dan simulasi dianggap efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep. Pendekatan ini memungkinkan peserta langsung mengaitkan teori dengan kondisi nyata di lapangan (Putra & Wulandari, 2023). Pelatihan tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga membentuk pola pikir reflektif yang dibutuhkan guru dalam menghadapi tantangan implementasi kurikulum baru.

Kegiatan *In-House Training* (IHT) ini dinilai berhasil mencapai tujuan strategis. Salah satu capaian pentingnya adalah tersusunnya dokumen kajian implementasi manajemen kurikulum dan sistem asesmen. Dokumen ini mencerminkan kolaborasi aktif antara guru dan pimpinan sekolah. Selain menjadi pedoman internal, dokumen tersebut juga berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan sekolah yang berpihak pada murid (Susanto, 2022).

Selain itu, pelatihan ini turut meningkatkan keterampilan teknis guru dalam menyusun KOSP, ATP, modul ajar, serta instrumen asesmen formatif dan sumatif. Fakta ini memperkuat argumen bahwa IHT merupakan instrumen yang efektif dalam penguatan kapasitas profesional guru, terutama di era transformasi pendidikan (Wijayanti, Ramadhan, & Utami, 2023).

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa praktik baik yang dihasilkan layak untuk direplikasi oleh satuan pendidikan lain. Dokumentasi hasil pelatihan menjadi bukti nyata bahwa program serupa dapat dikembangkan secara lebih luas, dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan (Kemendikbudristek, 2022).

Untuk menjamin keberlanjutan dampak pelatihan, diperlukan strategi penguatan pasca-program. Beberapa langkah yang disarankan antara lain pembentukan komunitas belajar profesional berbasis KKG atau MGMP Kurikulum Merdeka, pelibatan fasilitator dalam program pendampingan berkelanjutan, serta integrasi hasil pelatihan ke dalam program kerja tahunan sekolah (Putra & Wulandari, 2023). Strategi-strategi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembinaan profesional guru yang berkelanjutan.

Dukungan aktif dari manajemen sekolah menjadi kunci dalam menciptakan budaya reflektif dan kolaboratif. Hasil pelatihan perlu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan agar pelatihan tidak sekadar menjadi agenda jangka pendek, tetapi berkembang menjadi sistem pembinaan yang berdampak luas dan berkelanjutan terhadap mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

SIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Putra Gununghalu telah berhasil memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kompetensi guru dalam mengimplementasikan manajemen kurikulum dan sistem penilaian berbasis Kurikulum Merdeka. Pelatihan *In-House Training* (IHT) yang dirancang secara sistematis mampu menjawab kebutuhan praktis guru di lapangan, terutama dalam menyusun perangkat ajar dan merancang asesmen yang kontekstual dan adil. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta, dengan respons positif terhadap materi yang disampaikan, metode pelatihan, serta kualitas fasilitator. Peningkatan kemampuan guru dalam menyusun dokumen seperti Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, dan instrumen asesmen menjadi salah satu capaian utama kegiatan ini. Dokumen hasil kajian yang disusun selama pelatihan mencerminkan proses reflektif dan kolaboratif antara guru dan manajemen sekolah. Rekomendasi strategis yang dihasilkan berfungsi sebagai pijakan penting dalam penyusunan kebijakan internal sekolah, serta dapat diadopsi oleh satuan pendidikan lain yang tengah beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini telah membangun pondasi kuat untuk pelaksanaan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Efektivitas program terlihat dari meningkatnya kepercayaan diri guru dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian autentik yang sesuai dengan karakteristik siswa. Model pelatihan yang digunakan berpotensi direplikasi pada konteks pendidikan serupa, menjadikannya sebagai praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan pelatihan guru. Keberhasilan program ini juga memperkuat peran institusi pendidikan tinggi dalam mendampingi sekolah menuju transformasi pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Dokumentasi kegiatan dirancang agar dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional. Publikasi tersebut diharapkan memperluas jangkauan dampak kegiatan, sekaligus menyumbang pada pengembangan ilmu dan kebijakan pendidikan. Keberlanjutan program dapat diwujudkan melalui integrasi hasil pelatihan ke dalam program kerja sekolah, penguatan komunitas belajar guru, dan pendampingan lanjutan dari fasilitator. Pencapaian ini membuktikan bahwa sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah mampu menghasilkan solusi inovatif yang aplikatif dalam menjawab tantangan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan PKM telah membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pendidikan. Setiap hasil yang dicapai memberikan nilai strategis, baik dalam lingkup lokal sekolah

maupun dalam tataran kebijakan pendidikan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, A., & Armawati, D. (2020). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Anwar, S. (2018). Implementasi In House Training (IHT) Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 25*(1), 45–52. https://doi.org/10.17509/jap.v25i1.11235

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). *Kebijakan Kurikulum Merdeka: Pembelajaran Berdiferensiasi dan Asesmen Autentik*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

Kurniawati, D., & Hidayatullah, S. (2019). Efektivitas Pelatihan Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24*(3), 322–332. https://doi.org/10.24832/jpnk.v24i3.1234

Mulyasa, E. (2021). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustika, I., & Rahman, T. (2022). Pengembangan Sistem Penilaian Otentik Berbasis Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Inovasi Pendidikan, 18*(2), 115–126. https://doi.org/10.21009/jip.182.10

Nugroho, A., & Lestari, D. (2021). *Asesmen Autentik dalam Pembelajaran Berbasis Proyek*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 10(3), 123-135.

Permendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan. (2022). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Putra, A. R., & Wulandari, N. (2023). *Strategi Publikasi Ilmiah dalam Pengabdian kepada Masyarakat*. Jurnal Pengabdian dan Inovasi Pendidikan, 5(1), 34–46.

Sagala, S. (2020). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Sari, D. M., & Pranoto, R. (2022). *Pembelajaran Berdiferensiasi sebagai Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Kurikulum Merdeka*. Jurnal Pendidikan Inovatif, 14(1), 78–89.

Suharyanto, T. (2022). *Peran Tim Pengembang Kurikulum dalam Implementasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 8(2), 56-68.

Susanto, B. (2022). *Model Praktik Baik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Manajemen Pendidikan Vokasi, 7(2), 89–101.

Wijayanti, S., Ramadhan, F., & Utami, L. (2023). *Transformasi Digital dalam Administrasi Pembelajaran di Era Merdeka Belajar*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 11(1), 44-59.